PROSES PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BERDASARKAN PERATUBAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERBENAAN DAN RETRIBUSI PEREZINAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG



Stripsi

Windules Dotal Messocki Perversion Memperoleh Celar Sarjana Wakasa Peksitan Bukasa Uptversion Selvijaya

Oteb

Nema NIM : Lin Earlies &r Ginting

: 02633160653

PARULTAS EURUM AYALAYA AYALABUM 2007 352.07 Gin

15149/15511

200 PROSES PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN CIME BERDASARKAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN BANGUNAN DI-KOTA PALEMBANG



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

Nama

: Lia Karina Br Ginting

NIM

: 02033100053

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA 2007

Lembaran Pengesahan

PROSES PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

> Oleh Lia Karina Br Ginting NIM 02033100053

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Hj.Djasmaniar M.,S.H.,M.S.

NIP 130789431

Pembimbing Pembantu

Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum

NIP 132008694

Telah diuji dan lulus pada:

Hari

: Rabu

Tanggal

: 7 Pebruari 2007

Nama

: Lia Karina br Ginting

No. Induk Mahasiswa

: 02033100053

Tim Penguji:

1. Ketua

: M.Fikri Salman, S.H.

2. Sekretaris : Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.H.

3. Auggota : Nashriana, S.H., M.Hum.

4. Anggota : Hj.Djasmaniar M.,S.H.,M.S.

Indralaya, Pebruari 2007

Auscell

Mengetahui,

Dekan,

M.Rasyid Ariman., S.H., MH.

NIP.130 604 256

Motto:

I know who hold the future,

And I know who holds my hand;

With God things don't just happen

Everything by Him is planned. (A. Smith)

Sripsi ini kupersembahkan untuk:

- > Orangtua yang kukasihi
- Saudara-saudaraku tempat ku berbagi
- > Teman-teman dalam suka dukaku
- > Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkn kerada Bapa Tritunggal, karena dengam kasih dan berkat yang dilimpahkan penulis darat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Proses Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Berdasarkan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2004 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan di Kota Palembang", penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan berkat dukungan dan bimbingan dari Ibu dan Bapak Dosen serta pihak-pihak lain yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikat bekal ilmu pengetahuan dan semangat bagi penulis sampai akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan sekalilagi puji dan syukur kepada Bapa Tritunggal, semoga kasih dan berkatnya, senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, Amin

Indralaya, 14 Maret 2007

Lia Karina br Ginting

Lembar Dedikasi

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan Bapak dan Ibu Dosen, serta pihak-pihak lain, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak M.Rasyid Ariman SH.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 2. Bapak Ruben Achmad 3H.M.hum. selaku Pembantu Deran I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 3. Ibu Wahyu Ernanings h SH.M.Hum. selaku Penibamu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Srivijaya.
- 4. Bapak Fahmi Yoesmar AR.SH.M.S. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwija a.
- 5. Bapak M. Fikri Salman S.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 6. Ibu Hj.Djasmaniar M.,S.H,M.S. selaki Pembimbing Utama, yang dengan kasih dan kesabaran memberikan bimbingan dai. dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
- 7. Ibu Sri Turatmiyah S.H,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang dengan tulus meniberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Ibu Sri Handayani S H M.Hum. selaku Pembimbing Akedemik, yang selama ini telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis dari awal kuliah hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
- 9. Seluruh Staff di Dinas Tata Kota Palembang, terutama kepada bapak Yuni Rismansyah ,S.H. yang dengan tulus memberikan bimbingan dan memberi bahan untuk menyelesaiakn skripsi ini, Bapak Tasri,S.Sos, dan Bapak Faisyar,SE.MSP atas keramahannya.
- 10. Buat orang tuaku yang selaku mentukung baik dari segi materi dan spiritual.

- 11. Buat saudara-saudaraku, Alex, Ingan, dan Jeng, yang selalu memberi semangat dan motivasi, serta adik-adikku Gia dan Oki, semoga Tuhan selalu beserta kita, Amin.
- 12 buat sepupuku bang Iwan, kak Mila, yang selama ini memberi nasihat dan motivasi, buat ponakanku kaka, nggak kuat deh manjanya. Buat mus.
- 13. Buat teman-teman baikku Fina, Rina, Pinta, Siska, Dita, Ana yang selama perkuliahan ini kita saling bahu membahu menjalaninya bersama, banyak suka duka yang kita jalani, semoga menjadi bekal bagi kita di kemudian hari dan dapat menjadi kekuatan diantara kita. Buat Dian Puspitasari yang namanya harus lengkap katanya, semoga dapat menjadi lebih kuat dan mandiri, kasian ya sendirian deh konsultasinya, semangat ya ngerjain skripsinya. Buat heni juga, chayoo.. bik.
- 14. Buat Friska, Grace dan lakson teman dalam menyelesaikan skripsi.
- 15. Buat adik-adik tingkatk ı, semangat ya....

Indialaya, 14 pebruari 2007

Lia Karina Br Ginting

DAFTAR ISI

	LOT FERPUSTACASE Halam	
KATA PENG \NTAR	WHATE STAR SECONDARYA	í
LEMBAR DEDIKASI	Na 14 (1941 : 070210	ii
DAFTAR ISI	TEN . 2 1 FEB 2007	iv
BAB I. PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Perumusan Masalah		5
C. Tujuan dan manfaat		5
D. Metode Penelitian		6
BAB II. TINJAUAN PUSTAK	(A	
A.Pengertian Umum Tentang	Perizinan Pembangunan Gedung	9
1. Perencanaan fisik pen	nbangunan	10
2. Pengertian Izin		13
a. Tujuan Perizinar	n	14
b. Substansi Izin M	Mendirikan Bangunan	16
B. Bentuk Pembangunan Ged	ung	17
1. Pembangunan perum	nahan tidak bersusun	17
a. Bentuk Pemban	gunan Perumahan Tidak Bersusun	17
b. Dasar Hukum Pe	embangunan Perumahan Tidak Bersusun	19
	nahan Bersusun	20
	gunan Rumah Susun	20
	m Pembangunan Rumah Susun	

c. Tujuan Pembangi nan Rumah Susun	23
d. Persyaratan Pembangunan Rumah Susun	24
3. Pembangunan Apartemen	
a. Pengertian Apartemen	27
b. Strata Title Pada Apartemen	28
4. Pembangunan Gedung Perkantoran	28
C. Bangunan Gedung Berdasarkan UU No. 28 tahun 2002	29
Pengertian Bangunan Gedung	
2. Asas, Tujuan dan Fungsi Bangunan Gedung	
a. Asas Bangunan Gedun	30
b.Tujuan Pengaturan Bangunan Gedung	31
c. Fungsi Bangunan Gedung	31
Persyaratan Bangunan Gedung	32
a Persyaratan Administratif	32
b. Persyaratan Teknis Bangunan Gedung	35
BAB III. PROSES IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG	
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO.13 TAHUN	
2004 DI KOTA PALEMBANG	
A. Proses Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kepada	
Pemohon	44
1. Rencana Kota Kaitannya Dengan Pendirian Bangunan	44
2. Kelengkapan Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan	
Bangunan	47

3. Mekanisme Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	51
4. Penolakan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan	54
B. Akibat Hukum Atas Penyimpangan Izin Mendirikan Bangunan	55
1. Pengendalian Terhadap Pembangunan Dalam Pemberian	
Izin Mendirikan Bangunan	55
2. Pelaksar aan Pengawasan Lalam Pembangunan Dalam	
Kota Palembang	56
a. Kegiatan Pengawasan	57
b. Pola Pengawasan	59
3. Tindakan Penertiban	62
a. Kegiatan Penertiban	63
b. Tahap-Tahap Penertiban	64
c. Tingkatan Penindakan Dalam Penertiban	65
4. Sanksi	66
a. Bentuk Aspek Penyimpangan	66
b. Bentuk Pengenaan Sanksi	68
c. Pengenaan Sanksi	71
5. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan	72
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN .	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun ini, keadaan kota Palembang diwarnai dengan munculnya bangunan fisik yang mengarah pada kota kota metropolitan, hal ini terlihat dari pembangunan sarana dan prasarana, serta diberbagai kawasan, khususnya yang terletak dipinggir jalan strategis berdiri ruko-ruko dan gedunggedung swalayan baru dengan aneka bentuk dan jenis kegiatannya.

Beberapa lahan yang tadinya kosong, kini terletak berbagai bangunan fisik dengan berbagai kegiatan ekonomi, perdagangan dan tempat hiburan seperti Fantasy Island yang baru dibangun. Apabila diperhatikan bahwa bisnis perumahan seperti rumah susun sudah mulai berkembang, hal ini terlihat sudah terdapat beberapa rumah susun di Palembang.

Menjamurnya bangunan-bangunan gedung di Palembang menunjukkan suatu pertumbuhan ekonomi, dimana fungsi dan tujuan pembangunan bangunan gedung tersebut beraneka ragam, baik untuk perdagangan, perusahaan, sosial, jasa maupun rumah hunian, karena seperti yang diketahui bangunan gedung adalah suatu wadah tempat manusia melakukan aktivitasnya, baik aktivitas sosial dan budaya maupun aktivitas ekonomi. Wadah ini merupakan salah satu kebutuhan dasar (basic need)

dari manusia dimana manusia semakin bertambah banyak dan kebutuhan basic need ini semakin diperlukan, mengingat kemajuan peradaban manusia selalu berkembang.

Karena bangunan gedung yang mempunyai berbagai macam fungsi pendiriannya dan merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran yang vital dalam kehidupan sehari-hari. I'emenuhan kebutuhan tempat hunian memegang peran penting dalam peran untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada umumnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung perlu terus didorong sebagai salah satu sektor strategis yang harus didukung oleh semua pihak terkait, karateristik pembangunan bangunan gedung bersifat multisektoral dan menyentuh langsung terhadap pemenuhan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini pelaksanaan pengadaannya menjadi tangung jawab masyarakat sendiri, mendukungnya melalui penciptaan iklim yang kondusif, seperti : Peraturan Perundang-undangan, penyediaan sarana dan prasarana dasar, dan penyediaan akses pembiayaan.²

Namun berdirinya bangunan tersebut bukanlah merupakan hal yang mudah, Karena bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang oleh karena itu dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

¹ Bangunan sebagai kebutuhan manusia, www.pu.go.id,ditjen

² Satuan kerja perumahan dan pemukiman Indonesia,
www.ppk.lipi.go.id/file/publikasi/makalah.

berlaku.³ Karena penyelenggaraan bangunan gedung, selain memperhitungkan fungsi bangunan gedul. 2 terhadap penghuninya dan dalam bangunan itu sendiri, juga harus mempertimbangkan fungsi bangunan gedung terhadap kondisi alam sekitar.⁴ Sehingga peranan pemerintah dan masyarakat sekitar sangat berpengaruh pada pemberian izin mendirikan bangunan tersebut kepada pihak-pihak yang ingin mendirikan bangunan, sehingga d harapkan bangunan ini akan lebih meningkatkan estetika suatu desa atau kota, serta dapat menjadi bagian dari lingkungan hidup dan menjadi wadah melestarikan fungsi lindung, seperti menjaga sirkuiasi air dan udara sebagai Sumber Daya Alam yang penting bagi kehidupan, dengan demikian diharapkan penyelenggaraan bangunan gedung yang baik akan memberikan dampak positif bagi kualitas lingkungan hidup, dimana bangunan itu diwujudkan. Oleh karena itu banyak persyaratan yang har is dipenuhi oleh pihak yang ingin mendirikan bangunan tersebut.

Semua prosedur dan perszaratan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Banguan di Kota Palembang. Syarat mendirikan bangunan tersebut adalah adanya Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota yang merupakan persyaratan administratif. Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai pendirian bangunan tersebut namun banyak ditemukan adanya pembangunan tanpa disertai oleh Surat Izin Mendirikan Bangunan sehingga pemerintah dan masyarakat

³ Penjelasan dari undang-undang bangunan gedung No. 28 Tahun 2002
⁴ Pelaksanaan persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagai upaya meningkatkan kualiats lingkungan hidup. www.pu.go.id/ditjen-taukim/him-lmpau.

itu sendiri mengalami kesulitan, bagi pemerintah kesulitan dalam penarifan retribusi dan bagi masyarakat itu sendiri mengenai jaminan dan kepastian mengenai bangunan itu sendiri.

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangunan gedung, karena setiap mendirikan bangunan di Kota Palembang harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan kalau tidak akan dikenakan sanksi. ⁵ Seperti yang di tegaskan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002, pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu persyaratan administrative yang wajib dalam penyelenggaraan pembangunan gedung. ⁶ Bila diperhatikan Izin Mendirikan Bangunan ini dapat mempunyai fungsi, yaitu:

- 1. Menjadi alat kontrol teknis Pembangunan daerah.
- 2. Menjadi sumber andalan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyelenggaraan ini untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan Gedung serta harus di selenggarakan secara tertib.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan sangat penting dan menimbulkan minat untuk mengadakan penelitian tentang "Proses Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retripusi Perizinan Bangunan di Kota Palembang"

' ibia

⁵ Public Service, www. Indomedia.com/sripo/2006/04/1504, h/16 Ucok Hidayat Kadinas Tata Kota Palembang,

⁶ Implikasi UU Bangunan Gedurg, www. Pu.go.id/ditjen-mukim-16-k

B. Perumusan Masalah

- Bagaimanakah Proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Tata Kota kepada pihak yang ingin mendirikan bangunan di Kota Palembang;
- 2. Apa akibat hukum terhadap peryimpangan dari Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Dinas Tata Kota Palembang;

C. Tujuan dan menfaat

1. Tujuan

- a) Untuk mengetahui Proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Tata Kota kepada pihak yang ingin mendirikan bangunan di Kota Palembang.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penyimpangan dari Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Dinas Tata Kota Palembang.

2. Manfaat

a. Segi praktisi

Hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bagaimana prosesnya sehingga di kemudian hari bangunan gedung yang dibangun tidak menimbulkan permasalahan.

b. Segi teoritis

Sebagai bahan infomasi tambahan bagi mata kuliah yang terkait

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris. karena menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum empiris adalah berusaha melihat efektifitas hukum tersebut dalam kenyataannya.

Sedangkan menurut Bambang Waluyo, penelitian empiris adalah penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. ⁹Dalam penelitian empiris sunber data yang utama adalah data yang diperoleh di lapangan.

Selain penelitian erapiris, penulis juga menggunakan jenis penelitian normative, yaitu mengkaji ketentuan peundang-undangan beserta peraturan-peraturan pelaksananya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam skripsi ini, sebagai data pelengkap.

2. Sumber Data

Ada dua macam sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu;

 a) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan, pada instansi atau badan yang berhubungan dengan pemberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Palembang

⁸ Pengantar Penelitian Hukum, Soejono Soekanto, , Jakarta, VI (Press) 1986, hlm 51

⁹ Penelitian Hukum dalam Praktek, Bambang Waluyo, , Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hlm 13

b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dokumentasi berupa buku-buku dan karya ilmiah dibidang hukum yang relevan, serta peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan dan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Adapun pengumpulan bahan hukum primer cilakukan dengan cara mendatangi secara langsung dengan pejabat yang terkait yaitu pejabat Kantor Dinas Tata Kota di Palembang dan masyarakat yang terkait.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan mendirikan bangunan. Dipelajari juga berbagai bahan-bahan tertulis lainnya seperti buku-buku dan karya ilmiah bidang hukum lainnya yang relevan dengan pokok masalah dalam penclitian, berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis yang terkumpul diadakan pencatatan dan dikelompokkan sesuai dengan relevansi penelitian skripsi ini.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dan yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, akan dianalisis secara Deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh

kemudian di teliti untuk memperoleh data yang benar. Kemudian dianalisis dengan cara diuraikan dan disusun secara sistematis, untuk dapat menghasilkan kesimpulan dari permasalahan tersebut diatas.

Daftar Pustaka

Buku:

- A.Ridwan Halim, Sari Hukum Hak Milik, Kondominium dan Rumah susun, Puncak Karma Jakarta, 1990
- Arie S Hutagalung, Condoinium dan permasalahannya, UI-Press, Jakarta, 1997
- Bambang Waluyo, Penelitian Lukum dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 1991
- DR.Andi Hamzah, SH, I Wayan Swandra, SH, BA, Manalu, SH, Dasar-dasar hukum perumahan, PT Rineka Cipta, Jakarta 2000
- Emanuel sujatmoko, Perizinan Daerah, Yuridika No. 4 Tahun XII Juli-Agustus 1997
- J.B.J.M. Ten Berge dan N.M Spelt, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993
- Komar Andasamita, Hukum Apartemen, Ikatan Notaris Indonesia, komisariat Daerah Jawa Barat,
- K Wantjik Saleh SH, Hak anda atas tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985
- Philipus M. Mardjon ET al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada Universitas Press, cet 3, tahun 1994
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitiun Hukum, Jakarta, VI (Press) 1986

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 16 Tahun 1985 Tentani, Rumah Susun

Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Pemanfaatan Ruang

Undang-undang No 28 tahun 2002 Tentang Jangunan Gedung

Penjelasan undang-undang bangunan gedung No. 28 Tahun 2002

- Peraturan Daerah No 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan Dan Rertribusi Perizinanan Bangunan di Kota Palembang
- KepMen Negar: Perumahan Pakyat selaku Ketua Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pernukiman Nasional No.: 08/kpts/bkp4n/1996
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Izin Bangunan.

Internet:

www.pu.go.id,ditjen, Langunan se bagai kebutuhan manusia,

- www.ppk.lipi.go.id/file/publikasi/inakalah, Satuan kerja perumahan dan pemukiman Indonesia.
- www.pu.go.id/ditjen-mukim/htm-lmpau.Pelaksanaan persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagai upaya meningkatkan kualiats lingkungan hidup
- www. Indomedia.com/sripo/2006/04/1504, Public Service, h06 Ucok Hidayat Kadinas Tata Kota Palembang.
- www. Pu.go.id/ditjen-mukim-16-k, Implikasi UU Bangunan Gedung

www.wikideia.go.id

- www.library.gunadarma.ac.id/files/disk1/8jbptgunadarma, Hukum pranata pembangunan
- http://www.pu.go.id/ditjen_mukim/rpp/RPPPerasyaratan281003.pdf,
 rancangan PP RI NO... tahun 2003, tentang persyaratan administrative dan
 teknis bangunan
- www.madiun.go.id/ijin/imb.pdf, Manfaa: bangunan memperoleh IMBTipe perumahan kelompok, materi kuliah kota dan pemukiman

www.bkpm.go.id/en/file/pen-pemukiman

penjelasan khusus sector pemukiman dan prasarana wilayah, Kenyamanan sebagai syarat pembangunan

http://www.kimpraswil.go.id/balitbang/puskim/Homepage%20Modul%202003/ modulc3/MAKALAH%20C3 3.pdf, Aspek Perencanaan dan Perancangan Bangunan Gedung

www.pu.go.id/taru/nspm 122, Pengeiolaan Ruang Terbuka Hijau, Penataan Ruang.

http://www.kimpraswil.go.id/balitbang/puskim/Homepage%20Modul%202003/modulc3/MAKALAH%20C3 2.pdf,Penanggulangan bahaya kebakaran

www.kompas.com/kon/pas-cetak/0510/21/property

www.pu.go.id, Rumah dan Aspek Keselamatan Yoppy OL, , Kenyamanan sebagai Aspek Perencanaan dan Perancangan Bangunan Gedung

www.pu.go.id. Fanani Aziz Alwi, Surat Izin Mendirikan Bangunan dan Tertib Pembangunan Kota.

www. pu.go.id, Fasilitas dan Penyelesaian Pedoman Pengendalian Pemanfataan Kawasan Perkotaan, V-5

www. Penataan Ruang. Pu go.id, Konsep Pengendalian Ruang di Perkotaan

